

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Suatu organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan bersama, namun untuk mencapai tujuan bersama tersebut perlu dilakukan secara fektif melalui peran manajemen yang baik dan benar dengan menetapkan strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan yang dapat mengatasi setiap perubahan yang terjadi dan tetap selaras dengan pencapaian tujuan organisasi.

Dalam mencapai tujuannya, setiap organisasi dipengaruhi oleh perilaku organisasi yang merupakan pencerminan dari perilaku dan sikap setiap pegawai yang merupakan anggota organisasi. Perilaku pegawai tersebut akan tercermin juga dari sikap pegawai terhadap organisasi tempat dia bekerja, yaitu apakah pegawai tersebut merasa puas atau tidak puas dalam bekerja yang akan berimbas pada produktivitas kerja.

Kepuasan kerja merupakan sikap umum seseorang terhadap pekerjaannya. Seseorang dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi memiliki sikap positif terhadap pekerjaannya. Seseorang yang kurang puas memiliki sikap yang negatif. Oleh sebab itu, berhubung pegawai merupakan tulang punggung dalam setiap organisasi, maka kepuasan kerja pegawai merupakan hal yang sangat penting untuk senantiasa diperhatikan oleh organisasi.

Kepuasan kerja pegawai pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Banten tentu saja dipengaruhi oleh berbagai faktor sehingga manajemen harus memberikan perhatian agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut antara lain: (1) lingkungan pekerjaan; (2) supervisi; (3) kesesuaian antara kepribadian pegawai dengan jenis pekerjaan yang diberikan; (4) kerjasama tim; dan (5) pelatihan dan pengembangan pegawai.

Dalam rangka meningkatkan kepuasan kerja pegawai, manajemen Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Banten perlu mengikuti beberapa langkah yang dapat meningkatkan kepuasan kerja

pegawainya. Salah satu cara terbaik adalah melakukan program umpan balik melalui survei kepuasan kerja pegawai atas layanan yang diberikan oleh organisasi untuk mendukung tugas-tugas teknis pengawasan. Dari data yang diperoleh peneliti yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja, tampak bahwa pegawai puas terhadap pelayanan dukungan di bidang keuangan, kepegawaian, dan penyediaan sarana prasarana.

Lebih lanjut, perlu diingat bahwa kondisi kerja sangat penting untuk kepuasan kerja pegawai yang antara lain menggambarkan bagaimana lingkungan kerja berupa tempat kerja, pengaturan pencahayaan ruangan, gangguan kebisingan suara, suhu udara di tempat kerja, dan peralatan kantor lainnya. Dengan terciptanya lingkungan pekerjaan yang baik akan meningkatkan kinerja organisasi. Dari data yang diperoleh oleh peneliti, manajemen telah memperhatikan pengaturan tempat kerja dengan baik agar dapat meningkatkan kemampuan pegawai dalam bekerja.

Sebagai gambaran umum, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei 1983 sebagai transformasi dari Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara (DJPKN). Tugas, fungsi, dan wewenang BPKP ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 03 Tahun 2013. BPKP berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Banten merupakan bagian integral dari BPKP yang mempunyai tugas dan fungsi untuk mendukung BPKP di dalam menjalankan peran strategiknya. Tugas dan Fungsi tersebut tertuang dalam pasal 2 Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tanggal 30 Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Perwakilan BPKP, yaitu melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta menyelenggarakan akuntabilitas di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Banten menyelenggarakan fungsi: (1) penyiapan rencana dan program kerja pengawasan atas: (a) pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan pengurusan barang milik/kekayaan negara; dan (b) pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pengurusan barang milik/kekayaan pemerintah daerah atas permintaan daerah; (2) penyelenggaraan tugas pemerintah yang bersifat strategis dan/atau lintas kementerian/lembaga/wilayah; (3) pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah; (4) evaluasi atas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah; (5) audit terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan Pemerintah, pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima Pemerintah, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atas permintaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (6) evaluasi terhadap pelaksanaan *good corporate governance (GCG)* dan laporan akuntabilitas kinerja pada BUMN, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan Pemerintah, dan BUMD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (7) audit investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan negara, BUMN, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan Pemerintah, audit terhadap hambatan kelancaran pembangunan (HKP), dan pemberian bantuan audit pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya; dan (8) pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian mutu pengawasan.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, BPKP diberikan mandat untuk melaksanakan: (1) asistensi kepada kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk meningkatkan pemahaman bagi pejabat pemerintah pusat/daerah dalam pengelolaan keuangan negara/daerah,

meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan tata kelola; (2) evaluasi terhadap penyerapan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah, dan memberikan rekomendasi langkah-langkah strategis percepatan penyerapan anggaran; (3) audit tujuan tertentu terhadap program-program strategis nasional yang mendapat perhatian publik dan menjadi isu terkini; dan (4) rencana aksi yang jelas, tepat, dan terjadwal dalam mendorong penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) disebutkan bahwa BPKP memperoleh mandat sebagai pengawas intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Banten merupakan satuan kerja instansi vertikal sebagai pelaksana di daerah, dengan wilayah kerja di Provinsi Banten yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPKP.

Berdasarkan data monitoring realisasi Program Kerja Pengawasan dan Pembinaan Tahunan (PKP2T) tahun 2014 yang diperoleh peneliti, jumlah target penugasan pengawasan (PP) tahun 2014 sebanyak 355 PP dan telah direalisasikan sebanyak 342 PP. Dengan demikian masih terdapat 13 PP atau 3,66% yang tidak dilaksanakan selama tahun 2014. Jika dilihat dari data rencana mulai penugasan (RMP) per bulan, maka dapat dilihat bahwa terdapat 10 PP atau 56,66% dari target 18 PP yang tidak dilaksanakan sesuai RMP bulan Februari 2014, sebanyak 22 PP atau 68,75% dari target 32 PP yang tidak dilaksanakan sesuai RMP bulan Juli 2014, dan sebanyak 2 PP atau 2,90% dari target 69 PP yang tidak dilaksanakan sesuai RMP bulan September 2014. Hal ini menunjukkan bahwa kurang kondusifnya lingkungan kerja.

Selain itu, dari data penugasan yang terbit selama tahun 2014 sebanyak 708 penugasan, masih terdapat 24 penugasan atau 3,40% yang terlambat penyelesaian laporannya, yang terdiri atas 8 penugasan atas kegiatan PKP2T

dan 16 penugasan atas kegiatan Non-PKP2T. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurang optimalnya supervisi dan masih kurang solidnya kerjasama tim.

Dari beberapa penjelasan yang telah dipaparkan di atas, tampak bahwa tingkat kepuasan kerja pegawai dipengaruhi oleh berbagai aspek dan tergantung pada sifat, jenis, wilayah, dan cakupan pekerjaan atau organisasinya. Hal ini yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian pada masalah kepuasan kerja pegawai, dengan judul penelitian:

“Pengaruh Lingkungan Kerja, Supervisi, dan Kerjasama Tim Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Banten”.

I.2 Pembatasan Masalah

Dari latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, ternyata masalah kepuasan kerja pegawai merupakan masalah yang luas, rumit, dan kompleks serta banyak faktor yang mempengaruhinya. Mengingat adanya keterbatasan peneliti dalam hal biaya, tenaga dan waktu yang dapat dikerahkan dalam penelitian ini, maka peneliti membatasi penelitian ini pada masalah-masalah, yaitu:

- 1) Lingkungan kerja yang kurang kondusif,
- 2) Kurang optimalnya supervisi, dan
- 3) Kurang solidnya kerjasama tim.

I.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan, sebagai berikut:

- 1) Apakah lingkungan kerja berpengaruh langsung positif terhadap kerjasama tim pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Banten?
- 2) Apakah lingkungan kerja berpengaruh langsung positif terhadap kepuasan kerja pegawai pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Banten?

- 3) Apakah supervisi berpengaruh langsung positif terhadap kerjasama tim pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Banten?
- 4) Apakah supervisi berpengaruh langsung positif terhadap kepuasan kerja pegawai pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Banten?
- 5) Apakah kerjasama tim berpengaruh langsung positif terhadap kepuasan kerja pegawai pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Banten?

I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari perumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan dari lingkungan kerja, supervisi, dan kerjasama tim terhadap kepuasan kerja pegawai pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Banten.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah untuk membantu manajemen Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Banten dalam memberikan kontribusi yang terkait dengan kepuasan kerja pegawai. Selain itu, hasil penelitian ini dapat berguna untuk mengembangkan ilmu/kegunaan teoritis dan membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada pada obyek yang diteliti serta untuk menambah ilmu pengetahuan bagi Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.